

# KINERJA PEMERINTAH DALAM WACANA MEDIA

**Rini Riyantini<sup>1</sup>, dan Oktaviyana Anggraini**

Jurusan Komunikasi FISIP UPN "Veteran" Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan 12450  
Telp. / HP. 081586755788, E-mail: rinihoriyantini@gmail.com

---

## Abstract

*This study aims to analyze the media discourse about the government's initial performance in law, economics and politics on Suara Karya daily newspaper headline, January edition 2010. especially the critical discourse from Teun A. Van Dijk. The research approach is qualitative descriptive which describes how the government's performance represented in media through 3 discourse object of the government's performance that consisting of 72 paragraphs. By studying the object documentation of which doing depth-interview to the chief editor of the political field as the key informant, the description text (macro-micro structure and superstructure), social cognition and social analysis related to power and access of media in society shows that Suara Karya uses more on the hyperbolic words. The discourse is formed based on the media agenda which is developed and balanced by the facts that occurred in the society. The discourse represents a lack of government success in overcoming the problem related to what was promised at the election previously, so that it shows the initial performance is not maximum. The discourse dominated by criticism regarding the problems related to economic, political and law unresolved. In social cognition of Suara Karya have broad access to government figures who act as resource persons in the process of writing the news and have a strength which is based on the ownership of media organizations as the Golkar party who is quite brave in expressing his criticism.*

**Key Words :** government initial performance, media discourse

---

## PENDAHULUAN

Berberapa permasalahan yang mencuat di negeri ini, mulai kasus korupsi, mafia hukum sampai kemiskinan menjadi lahan uji coba awal pemerintahan terpilih. Setiap kandidat selayaknya memiliki program unggulan yang diajukan sebagai komitmen terhadap masyarakat, yang sekaligus program tersebut berfungsi sebagai barometer keberhasilan ketika kandidat tersebut terpilih. Ukuran keberhasilan awal pemerintahan terpilih dikenal dengan program 100 hari atau tiga bulan pertama.

Lima belas program yang dicanangkan dengan 3 program unggulan penyelesaian kasus-kasus teraktual menjadi pusat perhatian masyarakat pada awal pemerintahan terpilih, hal ini terefleksikan pada aktivitas masyarakat secara langsung maupun terepresentasikan melalui media. Demonstrasi mahasiswa secara massal yang terjadi pada 28 Januari 2010 yang lalu merupakan kritik sosial terhadap kinerja awal pemerintah, sehingga harus disikapi secara cermat untuk evaluasi dan koreksi terhadap kiprah pemerintah setelah 3 bulan ke depan.

Dari lima belas program yang dikemukakan, belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan, sementara fakta lain menunjukkan terdapat beberapa aktivitas yang bersifat pemenuhan fasilitas internal antara lain renovasi pagar istana yang meng-

---

<sup>1</sup> Kontak Person : Rini Riyantini  
UPN "Veteran" Jakarta.  
Telp. 081586755788

habiskan dana miliaran rupiah, pergantian mobil dinas pejabat negara. Aktivitas tersebut yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.

Selain kritik sosial masyarakat secara langsung, mediapun sebagai organisasi profesi yang memiliki fungsi kontrol sosial harus dijadikan acuan dalam pengendalian pelaksanaan program pemerintah sehingga mendapat pengawalan yang kuat. Sebagai organisasi profesi, media memiliki karakteristik tertentu yang terkait dengan aspek kepemilikan serta kepentingan sehingga tidak mustahil apabila realitas sosial tersebut dikonstruksi secara politis.

Media sebagai sumber informasi berfungsi sebagai penghubung antara realitas sosial dengan khalayak, sehingga selain dapat memberikan gambaran tentang banyak hal, media juga memiliki kemampuan untuk berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik. Bahkan media juga dapat berkembang sebagai kelompok penekan kepentingan atau citra yang direpresentasikan untuk diletakkan dalam konteks kehidupan yang lebih empiris.

Berkaitan dengan masalah ini media memiliki andil besar dalam pemberitaan wacana tersebut sebagai alat kontrol sosial. Setiap informasi yang dikembangkan oleh media akan membentuk opini khalayak, sehingga pesan yang tertulis dalam teks media memiliki makna serta tujuan tertentu. Masyarakat di era reformasi serta perkembangan teknologi informasi yang pesat bahkan sudah sangat ketergantungan dengan media, bahkan sudah melekat dengan pola hidup masyarakat.

Berbagai media cetak semakin marak berkembang di kalangan masyarakat pasca reformasi dengan variasi sajian pemberitaan, sehingga tidak jarang bahkan antar media terjadi kontroversi pemberitaan. Hal ini yang harus menjadi perhatian khususnya para akademisi untuk memberikan gambaran terhadap khalayak tentang pemaknaan pemberitaan sebuah peristiwa oleh media. Salah satu media yang memiliki karakteristik salah satu partai terbesar adalah Suara Karya. Sebagai salah satu partai yang berkoalisi dengan pemerintah, apakah suara Karya masih cukup objektif serta konsisten dengan pemberitaannya terhadap kinerja pemerintah? Perlu pendalaman pemaknaan terhadap wacana pada *headline* Suara Karya bulan Januari 2010.

Penelitian ini bertujuan menganalisis wacana media tentang kinerja awal pemerintah dalam *Harian Umum Suara Karya* berdasarkan wacana kritis Teun A. Van Dijk.

Secara praktis penelitian ini memberikan gambaran kepada khalayak bagaimana *Harian Umum Suara Karya* merepresentasikan penilaian kinerja-

nya terhadap Pemerintah pada awal pemerintahannya yaitu 100 hari, sehingga khalayak dapat memahami bagaimana latar belakang serta tujuan media merepresentasikan suatu peristiwa baik secara linguistik, sosial ekonomi, serta politik.

Fungsi komunikasi massa sebagai sarana informasi melalui pemberitaan media, persuasif (tajuk rencana, artikel dan surat pembaca), transmisi budaya, serta korelasi yang menghubungkan khalayak dengan berbagai peristiwa (Nurudin, 2007:4). Sedangkan wacana menjelaskan sebuah peristiwa yang terjadi seperti terbentuknya sebuah kalimat atau pernyataan (Heryanto dalam Sobur, 2004:344). Pendapat lain dari Eriyanto (2001:5) menjelaskan bahwa analisis wacana sebagai suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari sang subjek yang mengemukakan suatu pernyataan. Wacana merupakan praktik sosial yang menyebabkan sebuah hubungan dialektis antara peristiwa yang diwacanakan dengan konteks sosial, budaya, ideologi tertentu. Disini bahasa dipandang sebagai faktor penting untuk merepresentasikan maksud si pembuat wacana. Menurut Eriyanto Analisis wacana berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh analisis isi kuantitatif (dalam sobur, 2004: 337-341). Perbedaan analisis wacana dengan analisis isi secara kuantitatif itu antara lain dalam analisis wacana lebih bersifat kualitatif, berpretensi memfokuskan pada pesan *latent* (tersembunyi), bukan hanya kata atau aspek isi lainnya yang dapat diko-dekan, tetapi struktur wacana yang kompleks pun dapat dianalisis pada berbagai tingkatan deskriptif, serta tidak bertujuan menggeneralisasi beberapa asumsi karena setiap peristiwa bersifat unik. Sedangkan Yoce (2009:49) mengungkapkan sebagai proses pengembangan dari komunikasi yang menggunakan simbol-simbol yang berkaitan dengan interpretasi dan peristiwa. Dengan demikian sebuah wacana merupakan bentuk interaksi yang bersifat pernyataan, pertanyaan, tuduhan atau ancaman (*assertion, question, accusation, threat*).

Selain berfungsi sebagai alat informasi, media juga sebagai kontrol sosial sehingga memiliki idealisme yang berkarakter sesuai dengan organisasi mediana dan merupakan tanggung jawab sosial. Bentuk informasi dalam media dikenal dengan pemberitaan yang memiliki urgensi dan klasifikasi atau bobot tersendiri. Klasifikasi utama pemberitaan adalah *headline* yang merupakan jantung media yang biasanya menyajikan peristiwa yang paling aktual yang menjadi topik utama.

*Headline adalah berita utama yang menurut penelitian redaksi surat kabar tersebut meru-*

*pakan berita terpenting dari semua berita yang disajikan dalam surat kabarnya hari itu. Karena itu, untuk headline diberikan tempat utama yang mudah dibaca, yaitu halaman satu pertama dan bagian paling kiri. Headline biasanya terdiri dari 3,4, atau 5 kolom Soehoet (2003:78).*

Suhandang (2004:115-116) menjelaskan bahwa berita utama merupakan intisari dari berita. Dibuat satu atau dua kalimat pendek, tapi cukup memberitahukan persoalan pokok peristiwa yang diberitakannya. Jadi, menurut definisi para ahli tersebut *headline* adalah berita terpenting yang ada pada surat kabar yang merupakan intisari dari berita.

## METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang menggambarkan pemaknaan wacana kinerja awal pemerintah pada Harian Umum Suara Karya. Data yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi merupakan kumpulan wacana *headline* dari Harian Umum Suara Karya selama bulan Januari 2010 dengan pertimbangan bahwa pada saat itu banyak peristiwa yang menunjukkan kritik penilaian terhadap pemerintah terkait dengan program yang diajukan pada 3 bulan pertama masa pemerintahan. Objek penelitian berupa wacana kinerja awal pemerintah yang terkait aspek hukum, ekonomi dan politik yang terdiri dari 3 wacana dengan jumlah paragraf sebanyak 72.

Data yang dikumpulkan dianalisis berdasarkan analisis wacana (*discourse analysis*) model Teun A. Van Dijk, yang meliputi analisis teks secara deskriptif yang meliputi struktur makro, superstruktur dan struktur mikro. Selanjutnya analisis kognisi sosial berdasarkan kesadaran mental wartawan dalam memandang pemerintahan. Bagaimana kepercayaan, pengetahuan, dan prasangka wartawan terhadap pemerintahan serta analisis sosial berdasarkan isu yang berkembang di masyarakat, sehingga untuk meneliti bagaimana wacana tentang suatu hal diproduksi dan dikonstruksi dalam masyarakat. Menurut Van Dijk, dalam analisis mengenai masyarakat ini, ada dua poin yang penting: kekuasaan (*power*), dan akses (*access*).

## PEMBAHASAN

Secara deskripsi analisis meliputi struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro dari ketiga wacana yaitu 100 Hari Pemerintahan Kerja Keras

Cenderung Sekedar Slogan, Program 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono Tidak Kredibel, serta Program 100 Hari Didominasi Kegamangan. Berdasarkan struktur makro, secara tematik dan topik mengangkat tema mengenai sepertiga akhir berjalannya Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II belum maksimal. KIB hanya condong mengurus tentang kasus Bank Century dan pinjaman luar negeri. Sementara itu, optimalisasi penerimaan perpajakan, bea dan cukai serta perencanaan pembangunan jelas terbengkalai.

Struktur makro menunjukkan bahwa pada wacana "Program 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono Tidak Kredibel", Suara Karya mengangkat tema tentang *survei* kepuasan masyarakat tentang kinerja SBY-Boediono dalam 100 hari pemerintahan, baik dalam hal hukum, politik, ekonomi yang dilakukan oleh beberapa tokoh. Masih dinilai kurang menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Beberapa topik yang merupakan bagian dari elemen, dalam wacana "Program 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono Tidak Kredibel" yaitu, (1) tingkat penurunan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan SBY. Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap wapres tidak mengalami perubahan. (2) Adanya kelemahan yang substansial pada program 100 hari pemerintahan yang menyebabkan pemerintah tidak istimewa karena belum merealisasikan bentuk dari pemerintahan reformasi birokrasi.

Pada wacana "Program 100 Hari Didominasi Kegamangan", Suara Karya mengangkat tema mengenai kinerja awal pemerintah dinilai gagal. Karena banyak sektor yang tidak menunjukkan kemajuan yang berarti, karena selama 100 hari pemerintah sibuk mengurus kasus hukum Bibit-Chandra dari kasus Bank Century, hingga kasus mafia hukum. Beberapa topik yang merupakan bagian dari elemen pada wacana "Program 100 Hari Didominasi Kegamangan". Yaitu (1) Adanya asumsi beberapa tokoh yang menilai pemerintahan seratus hari tidak ada kemajuan berarti. (2) Menyoroti tolak ukur kegagalan pemerintahan dalam masa seratus hari pemerintahan. (3) Adanya penilaian selama masa awal pemerintahan pemerintah kurang serius merealisasikan program kerja. Ketiga wacana tersebut hampir memiliki tema yang sama yaitu mengoreksi bagaimana kerja keras pemerintahan dalam waktu tiga bulan, dan mengkritik tentang prestasi yang dihasilkan pemerintah.

Secara superstruktur dengan meneliti keseluruhan isi berita terdapat beberapa kalimat yang mengandung makna deduktif (umum-khusus), yaitu pada wacana "100 Hari Pemerintahan Kerja Keras Cenderung Sekedar Slogan" (1) Alinea 2 baris ke-3,

yang isinya tantangan fundamental, khususnya optimalisasi penerimaan perpajakan serta bea dan cukai, nyaris terbengkalai. Skema (umum): Tantangan Fundamental. Sedangkan Skema (khusus): khususnya optimalisasi penerimaan perpajakan. (2) Alinea 8 baris Ke-1, yang isinya menurut dia, tidak ada indikator yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah di sektor keuangan terkait dengan program seratus hari KIB II ini. Skema (umum): Menurut dia, tidak ada indikator yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah. Sedangkan skema (khusus): di sektor keuangan. (3) Alinea 13 Baris ke-2 yang isinya terkait program stimulus ekonomi sudah lebih jelas. Itu amat patut diselesaikan karena secara konseptual program stimulus ekonomi sendiri sangat menjanjikan perbaikan terhadap kinerja ekonomi nasional. Skema (umum): terkait program stimulus ekonomi. Sedangkan skema (khusus): perbaikan terhadap kinerja ekonomi nasional. (4) Alinea 19 baris ke-1, yang isinya Bagi Ahmad Erani, kinerja pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan tidak menjanjikan arah perbaikan bagi kehidupan masyarakat luas. Skema (umum): kinerja pemerintahan. Sedangkan skema (khusus): di bidang perencanaan pembangunan. (5) Alinea 22 baris ke-1, yang isinya Ahmad juga mengkritik kinerja pemerintahan di bidang penanaman modal. Skema (umum): kinerja pemerintahan. Sedangkan skema (khusus): di bidang penanaman modal. (6) Alinea 24 Baris ke-1, yang isinya jadi karena itu pula, dalam masa seratus hari KIB II, pemerintah amat terobsesi meyakinkan publik bahwa iklim investasi di dalam negeri bisa disulap menjadi kondusif. Skema (umum) : dalam masa seratus hari KIB II. Sedangkan skema (khusus) : pemerintah.

Pada wacana "Program 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono Tidak Kredibel", terdapat kalimat yang mengandung makna deduktif (umum-khusus) yaitu, (1) Alinea 3 baris ke- 1, yang isinya Kusridho Ambardi kemudian mengutip *survey* lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait kinerja pemerintahan SBY-Boediono pada 100 hari pertama yang menunjukkan, tingkat kepuasan masyarakat menurun. skema (umum): Kusridho Ambardi kemudian mengutip survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait kinerja pemerintahan SBY-Boediono. Skema (khusus): menunjukkan, tingkat kepuasan masyarakat menurun. (2) Alinea 4 baris ke-1, yang isinya dalam hal persepsi masyarakat terkait kondisi penegakkan hukum di Indonesia, hasil survei menunjukkan, kecenderungan, menurun. Skema (umum): Dalam hal persepsi masyarakat. Skema (khusus): terkait kondisi penegakan hukum di Indo-

nesia. (3) Alinea 9 baris ke-1, yang isinya "Kepuasan kepada kinerja SBY-Boediono berkaitan erat dengan persepsi publik terhadap berbagai keadaan nasional, seperti keadaan politik, penegakan hukum, ekonomi secara nasional yang dirasakan memburuk," ujarnya. Skema (umum): Kepuasan kepada kinerja SBY-Boediono berkaitan erat dengan persepsi publik. Skema (khusus): terhadap berbagai keadaan nasional, seperti keadaan politik, penegakan hukum, ekonomi secara nasional yang dirasakan memburuk. (4) Alinea 20 baris ke-1 yang isinya Ia mencontohkan, terdapat berbagai cetak biru seperti cetak biru reformasi birokrasi Mahkamah Agung (MA) dan reformasi birokrasi Kejaksaan Agung. Skema (umum): Ia mencontohkan, terdapat berbagai cetak biru. Skema (khusus): seperti cetak biru reformasi birokrasi Mahkamah Agung (MA) dan reformasi birokrasi Kejaksaan Agung.

Wacana "Program 100 Hari Didominasi Kegagalan" yaitu, (1) pada *lead* yang isinya, Program seratus hari pemerintahan SBY-Boediono dinilai gagal. Sebab, banyak sektor tak menunjukkan kemajuan berarti, belum sesuai harapan masyarakat. Skema (Umum): Program seratus hari pemerintahan SBY-Boediono dinilai gagal. Skema (khusus): Sebab, banyak sektor tak menunjukan kemajuan berarti. (2) Alinea 2 baris ke-1, yang isinya masa kerja pemerintahan SBY-Boediono tidak menorehkan kemajuan berarti dalam pemberantasan korupsi. Skema (Umum): masa kerja pemerintahan SBY-Boediono tak menorehkan kemajuan berarti. Skema (khusus): dalam pemberantasan korupsi. (3) Alinea 11 baris ke-1, yang isinya Dia melihat selama seratus hari pertama pemerintahan SBY- Boediono presiden sibuk mengurus masalah hukum yang tidak menentu. Skema (umum): Dia melihat selama seratus hari pertama pemerintahan SBY-Boediono. Skema (khusus): presiden. (4) Alinea 14 baris ke- 1, yang isinya Di lain pihak itu, TB Hasanudin menuturkan, program seratus hari pemerintahan SBY-Boediono lebih banyak diisi pencitraan presiden. Skema (umum): program seratus hari pemerintahan SBY-Boediono. Skema (khusus): lebih banyak diisi pencitraan presiden. (5) Alinea 17 baris ke-1, yang isinya Hasanudin juga mengatakan, program seratus hari pertama pemerintahan gagal lantaran program yang dicanangkan bersifat takabur dan secara konseptual memang sulit diselesaikan dalam seratus hari. Skema (umum): program seratus hari pertama pemerintahan gagal. Skema (khusus): program yang dicanangkan bersifat takabur dan secara konseptual memang sulit diselesaikan dalam seratus hari.

Struktur Mikro secara semantik latar positif

program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono: Ia mencontohkan, terdapat berbagai cetak biru seperti cetak biru reformasi birokrasi Mahkamah Agung (MA) dan reformasi birokrasi Kejaksaan Agung (dalam wacana “Program 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono Tidak Kredibel”, alinea 20 baris ke-1). Latar Negatif: Menginjak sepertiga akhir masa seratus hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, kinerja pemerintahan terkesan gamang, minimalis, dan cenderung sekedar “bermain” angka. Kerja keras pemerintah lebih banyak merupakan slogan (wacana “100 hari pemerintahan kerja keras cenderung sekedar slogan”, pada *lead*). Program kerja 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono (SBY-Boediono) di bidang politik, hukum, dan ekonomi dinilai terlalu utopis, sangat kualitatif dan cenderung hanya untuk kepentingan pencitraan ketimbang menciptakan kesejahteraan dan keadilan (terdapat dalam wacana “Program 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono Tidak Kredibel” pada bagian *lead*). Program seratus hari pemerintahan SBY-Boediono dinilai gagal. Sebab, banyak sektor tidak menunjukkan kemajuan berarti, belum sesuai dengan harapan masyarakat (dalam wacana “Program 100 hari didominasi Kegamangan” pada bagian *lead*). Eksplisit Negatif: Sementara itu, di sektor keuangan, dalam masa seratus hari pertama ini waktu dan perhatian pemerintah banyak tersita oleh isu skandal Bank Century. Tantangan fundamental, khususnya optimalisasi penerimaan perpajakan serta bea dan cukai, nyaris terbengkalai (dalam wacana “100 Hari Pemerintahan Kerja Keras Cenderung Sekedar Slogan”, alinea 2 baris ke-1). “Kepuasan kepada kinerja SBY-Boediono berkaitan erat dengan persepsi publik terhadap berbagai keadaan nasional, seperti keadaan politik, penegakan hukum, ekonomi secara nasional yang dirasakan memburuk,” ujarnya (wacana “Program 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono Tidak Kredibel”, alinea 9 baris ke-1). Febri Dinsyah menilai, masa kerja pemerintahan SBY-Boediono tak menorehkan kemajuan berarti dalam pemberantasan korupsi. Bahkan, masa seratus hari pemerintahan ini gagal mewujudkan Indonesia yang bersih (dalam wacana “Program 100 Hari Didominasi Kegamangan”, alinea 2 baris ke-1).

Detail Negatif: Karena itu, kalangan pengamat ekonomi mengaku sulit memberikan penilaian berkategori “cukup” sekalipun atas kinerja pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, keuangan, dan investasi dalam masa seratus hari KIB II ini (dalam wacana “100 Hari Pemerintahan Kerja Keras Cenderung Sekedar Slogan”, alinea 4 baris ke-1). Sebab, program 100 hari kerja tidak memi-

liki referensi yang jelas sebagai strategi dan kebijakan untuk lima tahun, sehingga mengakibatkan tidak ada benang merah antar program lima tahun KIB jilid II (wacana “Program 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono Tidak Kredibel” alinea 12 baris ke-2). Menurut Febri, lima poin menjadi tolak ukur kegagalan pemerintahan dalam masa seratus hari pertama ini, khususnya terkait pemberantasan korupsi (pada wacana “Program 100 Hari Didominasi Kegamangan”, alinea 3 baris ke-1).

Dalam semantik ini, banyak sekali elemen negatif yang direpresentasikan oleh Suara Karya. Ini dapat dilihat dari latar negatif dan detail negatif. Pada bagian ini bisa dilihat begitu banyak kritikan yang dituliskan dalam setiap wacana mengenai kinerja pemerintahan.

Aspek sintaksis yang terkait koherensi (pertalian atau jalinan antar kata). Pada keseluruhan wacana terdapat beberapa kata hubung yaitu, (1) kata hubung sementara, menyatakan pertentangan. terdapat pada berita “100 Hari Pemerintahan Kerja Keras Cenderung sekedar Slogan”, alinea 1 baris ke-2: Dalam perencanaan pembangunan nasional, untuk sementara ini pemerintah sekedar mencatat sukses mendorong realisasi pinjaman luar negeri. (2) Kata tapi, untuk menyatakan perlawanan kata. terdapat pada wacana “100 Hari Pemerintahan Kerja Keras Cenderung Sekedar Slogan”, alinea 3 baris ke-2: bahwa iklim penanaman modal di dalam negeri sudah kondusif. tapi, itu tidak ditunjang oleh realitas di lapangan. (3) Kata di, sebagai kata tunjuk. Terdapat pada isi wacana “100 Hari Pemerintahan Kerja Keras Cenderung Sekedar Slogan”, alinea 6 baris ke-3: Pemerintah, katanya, belum mampu menuntaskan pembenahan di bidang perpajakan, bea dan cukai, serta pelayanan publik lain. (4) Kata jadi, sebagai menyatakan fakta yang ada. Terdapat pada wacana “100 Hari Pemerintahan Kerja Keras Cenderung Sekedar Slogan”, alinea 9 baris ke-1: “Apa saja yang diperbaiki di sektor keuangan selama seratus hari ini, dan apa yang sudah dicapai, itu tidak jelas. jadi, di sektor keuangan, program seratus hari hanya jadi slogan,” ujar iman. (5) Kata sehingga, menyatakan penyelesaian. Terdapat pada alinea 17 baris ke-1: “Visi pemerintah tentang pembangunan ini harus diubah. Mestinya itu menjadi fokus program seratus hari KIB II, sehingga ke depan ini rencana – rencana pembangunan lebih *applicable*,” tutur Hendri. Terdapat pada alinea 12 baris ke-2 dalam wacana “Program 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono Tidak Kredibel”: program 100 hari kerja tidak memiliki referensi yang jelas sebagai strategi dan kebijakan untuk lima tahun, sehingga mengakibatkan tidak ada benang

merah antar program lima tahun KIB jilid II. (6) Kata padahal, menyatakan pertentangan. Terdapat pada wacana “100 Hari Pemerintahan Kerja Keras Cenderung Sekedar Slogan“, alinea 23 baris ke-7: dalam soal angka atau data investasi yang dibutuhkan pemerintah periode sebelumnya. “**padahal**, itu pun tidak selalu terlihat sejalan dengan realitas di lapangan,” kata Ahmad. (7) Kata bahkan, mempunyai arti untuk menunjukkan fakta yang ada. Wacana “Program 100 Hari Didominasi Kegamangan”, terdapat pada alinea 2 baris ke-1: Febri Dinsyah menilai, masa kerja pemerintahan SBY–Boediono tak menorehkan kemajuan berarti dalam pemberantasan korupsi. (8) kata dan, untuk menghubungkan dua fakta yang ada terdapat pada wacana “Program 100 Hari Didominasi Kegamangan”, alinea 13 baris ke-2: karena itu kritik yang tajam mesti ditanggapi dengan memperbaiki kinerja dan lebih serius merealisasikan program kerja,” ucap mantan ketua DPR Aceh ini. Terdapat pada alinea 1 baris ke- 2 dalam wacana “Program 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono Tidak Kredibel“: SBY-Boediono juga dinilai terlalu sibuk mengurus persoalan yang tidak prinsipil dan tidak berhubungan dengan kebutuhan mendesak masyarakat. (9) Kata akibatnya, menjelaskan mengenai dampak atau hubungan sebab akibat dari suatu fakta, terdapat pada alinea 21 baris ke-3 dalam wacana “Program 100 Hari Didominasi Kegamangan“: dalam seratus hari ini pemerintahan SBY- Boediono terlalu reaktif dan kurang antipatif terhadap dinamika domestik maupun internasional. Akibatnya, masalah dan tantangan cepat beralih menjadi gangguan terhadap jalannya pemerintahan. (10) Kata padahal, menyatakan pertentangan, terdapat pada alinea 22 baris ke-2 dalam wacana “Program 100 Hari Didominasi Kegamangan“: “ini ditunjukkan oleh isu hukum dan politik mengenai kejadian masa lalu yang terasa mendominasi. Padahal, baik hukum maupun politik punya koridor masing–masing yang terwakili secara independent oleh lembaga tinggi negara, yaitu Mahkamah Agung dan DPR,” ucapnya. (11) Kata dari. Terdapat pada alinea 19 baris ke-3 dalam wacana “Program 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono Tidak Kredibel“: berbagai bentuk cetak biru dari reformasi birokrasi. Secara Stilistik Leksikon (1) gamang: bimbang. Terdapat pada *lead* dalam wacana “100 Hari Pemerintahan Kerja Keras Cenderung Sekedar Slogan“baris ke- 3: kinerja pemerintahan terkesan gamang, minimalis, dan cenderung sekedar “bermain” angka. Di wacana “program 100 hari didominasi kegamangan” bagian *lead* baris ke-4: Langkah pemerintah bukan saja tidak fokus, melainkan juga lebih didominasi kegamangan. (2) Hanya jadi slo-

gan: hanya sekedar panggilan. Terdapat pada wacana “100 Hari Pemerintahan Kerja Keras Cenderung Sekedar Slogan“ alinea 9 baris ke-3: Jadi, di sektor keuangan, program seratus hari hanya jadi slogan,” ujar iman. (3) Hilang ditelan bumi: tak ada kabarnya. Terdapat pada wacana “100 Hari Pemerintahan Kerja Keras Cenderung Sekedar Slogan“ alinea 11 baris ke-3: Karena itu, katanya, program seratus hari pun seolah hilang ditelan bumi. (4) serba mentah: belum dibuat dengan benar. Terdapat pada wacana “100 Hari Pemerintahan Kerja Keras Cenderung Sekedar Slogan“ alinea 16 baris ke-3: banyak perencanaan masih serba mentah sehingga harus digodok lagi sebelum diimplementasikan di lapangan. (5) digodok: dikaji. Terdapat pada wacana “100 Hari Pemerintahan Kerja Keras Cenderung Sekedar Slogan“ alinea 16 baris ke-4: perencanaan masih serba mentah sehingga harus digodok lagi sebelum diimplementasikan di lapangan. (6) kedodoran: penurunan atau kerugian. Terdapat pada wacana “100 hari pemerintahan kerja keras Cenderung sekedar slogan“ alinea 21 baris ke-3: selama ini fungsi koordinasi yang diemban kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kedodoran. (7) utopis. pemikiran sosial. Terdapat pada *lead* dalam wacana “Program 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono Tidak Kredibel“ : Program kerja 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono (SBY-Boediono) di bidang politik, hukum, dan ekonomi dinilai terlalu utopis, sangat kualitatif dan cenderung hanya untuk kepentingan pencitraan ketimbang menciptakan kesejahteraan dan keadilan. (8) Politik kontemporer: politik yang modern. Terdapat pada wacana “Program 100 Hari Pemerintahan SBY- Boediono Tidak Kredibel“ alinea 7 baris ke-5: isu -isu politik kontemporer seperti kasus Bank Centrury, kasus koin Prita, dan kasus Bibit-Chandra,” ujarnya. (9) Benang merah: hubungan. Terdapat pada wacana “Program 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono Tidak Kredibel“ alinea 12 baris ke-3: sehingga mengakibatkan tidak ada benang merah antar program lima tahun KIB jilid II. (10) Masalah klasik: masalah lama. Terdapat pada wacana “Program 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono Tidak Kredibel“ alinea 16 baris ke-5: Dan menengah (UMKM). Saat ini banyak yang belum tercapai di sektor tersebut yang merupakan masalah klasik. (11) Cetak biru. terdapat pada wacana “Program 100 Hari Pemerintahan SBY- Boediono Tidak Kredibel“ alinea 18 baris ke- 3: bertekad merealisasikan berbagai bentuk cetak biru dari reformasi birokrasi. (12) ngerumpi: sekedar berbincang membicarakan sesuatu. Terdapat pada wacana “Program 100 Hari Didominasi

Kegamangan” alinea 9 baris ke-3: Dia menilai presiden selama masa ini lebih sibuk “*ngerumpi*” dibanding membangun program kongkret untuk mensejahterakan rakyat. (13) Kritik yang tajam: kritikan atau saran yang sangat dalam. Terdapat pada wacana “program 100 hari didominasi kegamangan” alinea 13 baris ke-2: “karena itu kritik yang tajam mesti ditanggapi dengan memperbaiki kinerja dan lebih serius merealisasikan program kerja”. (14) Pemerintahan ngawur: pemerintahan yang tidak sesuai dengan aturan dan tata tertib yang ada. Terdapat pada wacana “program 100 hari didominasi kegamangan” alinea 15 baris ke-4: Akibat presiden lebih sibuk membangun pencitraan, maka hasil kerja pemerintah ngawur. (15) dinamika domestik: permasalahan yang berasal dari dalam negeri. Terdapat pada wacana “program 100 hari didominasi kegamangan” alinea 21 baris ke-2: Erwin juga menilai, dalam seratus hari ini pemerintahan SBY-Boediono terlalu reaktif dan kurang antipatif terhadap dinamika domestik maupun internasional.

Secara retorik hasil analisis wacana diatas terdapat beberapa kata yang hiperbolik atau berlebihan seperti: (1) Hilang ditelan bumi : tak ada kabarnya. Terdapat pada wacana “100 hari pemerintahan kerja keras cenderung sekedar slogan” alinea 11 baris ke-3: Karena itu, katanya, program seratus hari pun seolah hilang ditelan bumi. (2) serba mentah : belum dibuat dengan benar. Terdapat pada wacana “100 hari pemerintahan kerja keras Cenderung sekedar slogan” alinea 16 baris ke-3: banyak perencanaan masih serba mentah sehingga harus digodok lagi sebelum diimplementasikan dilapangan. (3) kedodoran: penurunan atau kerugian. Terdapat pada wacana “100 hari pemerintahan kerja keras Cenderung sekedar slogan” alinea 21 baris ke-3: selama ini fungsi koordinasi yang diemban kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kedodoran. (4) berakrobat: memberikan hiburan. Terdapat pada wacana “100 Hari Pemerintahan Kerja Keras Cenderung Sekedar Slogan” alinea 23 baris ke-6: Apa yang ditempuh BKPM dalam rentang seratus hari, katanya, skedar berakrobat dalam soal angka atau data investasi yang dibutuhkan pemerintah periode sebelumnya. (5) politik kontemporer: politik yang modern. Terdapat pada wacana “Program 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono Tidak Kredibel” alinea 7 baris ke-5: isu-isu politik kontemporer seperti kasus Bank Centrury, kasus koin Prita, dan kasus Bibit- Chandra,” ujarnya. (6) benang merah: hubungan. Terdapat pada wacana “Program 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono Tidak Kredibel” alinea 12 baris ke-3: sehingga mengakibatkan tidak ada benang merah antar program lina tahun KIB

jilid II. (7) masalah klasik: masalah lama. Terdapat pada wacana “Program 100 Hari Pemerintahan SBY- Boediono Tidak Kredibel” alinea 16 baris ke-5: Dan menengah (UMKM). Apalagi, hingga saat ini banyak hal yang belum tercapai di sektor tersebut yang notabene merupakan masalah klasik. (8) kegamangan : bimbang. Terdapat pada wacana “Program 100 Hari Didominasi Kegamangan” di *lead* baris ke-4: Langkah pemerintah bukan saja tidak fokus, melainkan juga lebih didominasi kegamangan. (9) *ngerumpi*: sekedar berbincang membicarakan sesuatu. Terdapat pada wacana “Program 100 Hari Didominasi Kegamangan” alinea 9 baris ke-3: Dia menilai presiden selama masa seratus hari ini lebih sibuk “*ngerumpi*” dibanding membangun program kongkret untuk mensejahterakan rakyat. (10) pemerintahan ngawur: pemerintahan yang tidak sesuai dengan aturan dan tata tertib yang ada. Terdapat pada wacana “Program 100 Hari Didominasi Kegamangan” alinea 15 baris ke-4: Akibat presiden lebih sibuk membangun pencitraan, maka hasil kerja pemerintah ngawur.

Seluruh wacana yang penulis analisis, penulis melihat representasi suara karya dalam permasalahan kinerja pemerintahan ini, lebih banyak mengkritisi pemerintahan. Dalam wacananya Suara Karya seolah-olah mengajak para pembacanya untuk mengkritisi pemerintahan.

Analisis kognisi sosial dan analisis sosial dilakukan untuk menggambarkan bagaimana sebuah wacana itu di produksi dan untuk melihat sejauh mana representasi wartawan dalam menulis sebuah berita maka, penulis melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan wawancara bersama Bapak Victor A. Simandjuntak selaku penanggung jawab redaktur politik Suara Karya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sesuai dengan visinya untuk mencerdaskan bangsa dan memberi pencerahan kepada khalayak, pencerahan disini maksudnya adalah memberikan informasi kepada masyarakat secara mudah. Sebagai media cetak Suara Karya harus mengikuti kaidah penulisan naskah berita dan telah memenuhi unsur 5W+1H, serta mengandung unsur-unsur seperti baru, bermakna dan berpengaruh, menyangkut hidup orang banyak dan relevan. Yang menjadi hal penting dalam sebuah berita adalah saat memilih isu yang terpenting untuk mengisi *headline* dan berita. Suara Karya dalam memilih isunya tentunya harus menyangkut dengan kepentingan khalayak dan lebih mengedepankan berita politik, hukum dan ekonomi, tetapi juga suara karya memilih isu yang berkaitan dengan tokoh penting seperti halnya dengan pemasalahan program awal pemerintah

yang sempat menjadi pemberitaan Suara Karya di beberapa *headlinenya*. Realitas sosial mengenai wacana kinerja awal pemerintahan menjadi topik setiap media. Program tiga bulan pertama meliputi pemberantasan mafia hukun, pemberantasan teroris, revitalisasi industri pertahanan, kesediaan listrik, peningkatan produksi ketahanan pangan, revitalisasi pabrik pupuk dan gula, penataan tanah dan tata ruang, peningkatan infrastruktur, peningkatan pinjaman usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pendanaan, penanggulangan perubahan iklim dan lingkungan, reformasi kesehatan dengan mengubah paradigma masyarakat, reformasi pendidikan, kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana alam, koordinasi erat pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan di segala bidang. Tiga bulan berjalan banyak kalangan yang menilai pemerintahan tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal bahkan ada yang menilai gagal. Isu bisa menjadi sebuah berita apabila terkait dengan kepentingan masyarakat atau tokoh yang terlibat dalam isu tersebut berkaitan dengan aspek politik, hukum dan ekonomi.

Selain materi, *angle* atau sudut pandang penulisan pada sebuah berita harus diperhatikan. Wacana yang menjadi objek penelitian pada Suara Karya bulan Januari, lebih banyak membahas aspek ekonomi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam pemberitaan kinerja awal pemerintah, Suara Karya tidak hanya membicarakan mengenai masalah ekonomi, unsur politik dan hukum. Kebetulan pada bulan Januari lebih dominan unsur ekonominya. Ketiga wacana yang dijadikan objek penelitian, banyak mengemukakan opini para narasumber terhadap kinerja awal pemerintah. Seperti wacana "100 Hari Pemerintahan, Kerja Keras Cenderung Sekedar Slogan" menjelaskan bahwa program seratus hari pemerintahan belum mengalami perubahan yang berarti. Dalam wacana ini ada beberapa tokoh ekonomi yang memberikan evaluasi mengenai pemerintahan seratus hari, adalah satunya adalah Iman Sugema Ketua Badan Anggaran DPR. Beliau mengatakan, secara umum kinerja pemerintahan seratus hari di sektor keuangan masih jauh dari harapan publik. Dalam memilih narasumber Suara Karya cukup selektif disesuaikan dengan aspek yang akan dibahas, tetapi keberimbangan belum terpenuhi, belum melibatkan narasumber dari pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Hal ini juga diperkuat oleh Bapak Victor yang mengatakan, bahwa setiap narasumber yang diminta informasinya oleh Suara Karya telah melewati seleksi dan pertimbangan yang dilakukan oleh redaksi. Penggunaan kata perumpamaan

hanya sebagai penunjang untuk menekankan informasi yang terdapat dalam sebuah wacana, hal ini yang diungkapkan oleh Bapak Victor. Beliau juga menambahkan, setiap penulisan yang dibuat oleh wartawan telah mengalami proses *editing*, jadi jika terdapat kata yang terlalu berlebihan pasti *editor* akan memberitahu wartawan yang menulis berita tadi untuk segera diperbaiki.

Suara Karya sebagai salah satu media cetak dan sebagai alat kontrol sosial, mempunyai fungsi seperti media massa lainnya yaitu fungsi menyiarkan informasi (*to inform*), fungsi mendidik (*to educate*), fungsi menghibur (*to entertain*), dan fungsi mempengaruhi atau pengawas (*to influence*). Seperti yang dijelaskan pada Bab II Sebagai alat untuk menyampaikan suatu berita, penilaian, atau gambaran umum tentang banyak hal, media juga mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai intuisi yang dapat membentuk opini publik. Antara lain, karena media juga dapat berkembang sebagai kelompok penekan dan bahkan suatu kepentingan atau citra yang direpresentasikan untuk diletakkan dalam konteks kehidupan yang lebih empiris. Suara Karya merupakan harian umum yang mempunyai kedekatan *history* dengan partai Golkar. Sebagian saham dari Suara Karya adalah saham dari partai tersebut, karena kedekatan *history* yang sangat kental inilah Dalam menentukan pemberitaannya Suara Karya mempunyai kebijakan-kebijakan dalam mengatur pengelolaan medianya. Hal seperti itulah yang sangat mempengaruhi karakteristik sebuah media dalam menyampaikan informasinya. Inilah yang penulis tanyakan kepada Bapak Victor selaku redaksi Suara Karya mengenai sebuah media dibawah naungan partai. Suara Karya memang sebagian sahamnya dimiliki oleh partai Golkar, tapi perlu ditekankan bahwa Suara Karya bukan media yang dimiliki oleh partai Golkar sepenuhnya, dalam kebijakannya Suara Karya tetap memikirkan khalayak dan tetap mempunyai idealisme sebagai harian umum. Berkaitan dengan penulisan sebuah berita, penentuan sebuah wacana yang akan ditulis baik dari teks, penulisan, dan penyampaiannya Suara Karya mengikuti kebijakan yang ada. Dalam penentuan nilai beritanya Suara Karya diberi kebebasan untuk menentukan nilai kepentingan suatu berita tidak keluar dari kode etik dan kebijakan yang telah ada yang tentunya berdasarkan dengan fungsi media tersebut.

Dalam pemberitaan kinerja awal pemerintah Suara Karya cukup kritis sehingga khalayak dapat berasumsi negatif. Namun demikian telah memenuhi kaidah penulisan. Dari ketiga wacana tersebut, banyak terdapat representasi mengenai kritikan

terhadap kinerja awal pemerintah. Penulisan wacana ke dalam sebuah teks biasanya dipengaruhi oleh pemikiran wartawan yang menulis berita tersebut.

Wartawan menulis berdasarkan sudut pandang yang dipengaruhi oleh pola pikirnya sendiri yang diimbangkan oleh informasi yang didapat dari para narasumber untuk memperkuat berita menjadi seimbang, agar tercapai target Pemberitaan kinerja awal pemerintah dapat menjawab apakah program seratus hari pemerintahan dinilai berhasil atau gagal. Dalam mengkonstruksi sebuah realitas sosial, Suara Karya sudah mampu merepresentasikan sebuah realitas sosial menjadi sebuah wacana. Hanya saja dalam mengedepankan topik Suara Karya tidak universal karena kebijakan yang ada yakni mengkedepankan unsur, politik, hukum, dan ekonomi. Selain itu, Suara Karya selalu memberitakan hal negatif yang terjadi pada kinerja awal pemerintah. Seharusnya sebuah media massa dapat memberitakan sebuah informasi yang lebih berimbang tapi ini belum tergambar secara eksplisit pada pemberitaan yang ada di Suara Karya.

Jika dikaji lebih dalam wacana kinerja awal pemerintah di luar dari tiga unsur tadi, sebenarnya banyak hal yang dapat dianggap cukup berhasil yang menunjukkan prestasi pemerintah, misalnya perbaikan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang diresmikan SBY tersebut antara lain, pembangunan rumah susun sewa di Probolinggo dan Jember masing-masing senilai Rp 10,9 miliar. Pembangunan sistem pengadaan air minum di sejumlah wilayah di Jawa Timur senilai Rp 24,5 miliar. Serta pembangunan jalan lingkar Ngawi sepanjang 10,4 kilometer dengan biaya mencapai Rp 87,9 miliar. Berkaitan dengan pemberitaan Suara Karya, hal inilah yang akan menjadi masukan dalam menentukan sebuah wacana agar lebih menyoroti hal yang luas tidak tercakup masalah politik, hukum, ekonomi saja. Walaupun ketiga unsur tersebut adalah kebijakan yang telah dimiliki oleh Suara Karya, tetapi sebagai media massa yang mengawasi jalannya pemerintahan seharusnya harus terus memantau segala aspek mengenai pemerintahan.

Melalui wacana kinerja awal pemerintah, Suara Karya tetap menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol sosial melalui kritiknya terhadap pemerintah dan tetap menjalankan idealismenya sebagai media massa tanpa melihat latar belakang organisasi medianya. Sebagai media massa Suara Karya tentunya ingin memberikan informasi yang mendidik sekaligus sebagai pengawas jalannya pemerintahan, sehingga khalayak mendapatkan informasi yang objektif.

## SIMPULAN

Berdasarkan teks (struktur makro, superstruktur dan struktur mikro) serta hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemberitaan kinerja awal pemerintah, Suara Karya lebih banyak menggunakan kata-kata yang bersifat hiperbolik. Wacana dibentuk berdasarkan agenda media yang dikembangkan dan diimbangi dengan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Wacana tersebut merepresentasikan ketidakberhasilan pemerintah dalam mengatasi masalah sesuai dengan yang dijanjikan pada saat pemilihan, sehingga menunjukkan kinerja awal yang belum maksimal. Wacana banyak didominasi oleh kritikan mengenai masalah yang terkait aspek ekonomi, politik dan hukum yang belum terselesaikan. Secara kognisi sosial Suara Karya memiliki akses yang luas terhadap tokoh-tokoh pemerintahan yang berperan selaku narasumber dalam proses penulisan pemberitaan serta memiliki kekuatan yang dilatarbelakangi oleh kepemilikan organisasi media selaku partai Golkar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanto, Elvinaro, dan Erdiyana. 2004. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Simbiosis Rekatama Media. Bandung.
- Arifin, Bustanul. 2004. *Analisis Wacana Sebuah Kajian Bahasa Dalam Pemakaian*. Banyu Media Publishing. Malang.
- Dharma, Yoce Aliah. 2009. *Analisis Wacana Kritis*. Yrama Widya. Bandung.
- Efenddy, Onong Uchana. 2005. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Lkis. Yogyakarta
- Nurudin. 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*. PT. Raja Grafinda Persada. Jakarta.
- Sobur, Alex. 2004. *Analisis Teks Media*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Soehoet. 2003. *Dasar-Dasar Jurnalistik*. Kampus Tercinta. Jakarta.